

### **BAB III**

## **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

### **3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN**

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dalam konteks rencana pembangunan lima tahunan, pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Tema RKP 2023 **“peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** Hal ini sejalan dengan Indonesia yang masih menghadapi tantangan untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi dari dampak Pandemi yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia. Terlebih lagi konflik Rusia dan Ukraina juga menimbulkan dampak permasalahan baru antara lain gangguan rantai pasok hingga kenaikan harga komoditas dan energi. Sebagai RKP keempat dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, RKP 2023 dijabarkan dalam delapan arah kebijakan prioritas pembangunan yaitu : Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Peningkatan kualitas SDM melalui Kesehatan dan Pendidikan, Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job, Mendorong pemulihan dunia usaha, Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, Pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan Infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi, dan Pembangunan ibu kota Nusantara.

RKP 2023 juga memuat tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan tujuh Agenda Pembangunan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, antara lain :

1. Penguatan Ketahanan Ekonomi.
2. Pengembangan Wilayah.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia.
4. Peningkatan Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Penguatan Infrastruktur.
6. Pembangunan Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim.
7. Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Diharapkan Ketujuh Prioritas Nasional tersebut akan mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan tema RKP 2023. Berdasarkan fokus pembangunan RKP 2023, Pemerintah juga memiliki major project yakni akselerasi pengembangan energi terbarukan dengan anggaran Rp.118,8 miliar, food estate Rp. 743,2 miliar, reformasi system perlindungan social Rp. 87,89 triliun serta percepatan penurunan angka kematian ibu dan stunting Rp. 5,6 triliun. Juga adanya reformasi system Kesehatan nasional, jaringan Pelabuhan utama terpadu, transformasi digital Rp. 16,22 triliun, serta pembangunan ibu kota Nusantara Rp. 27,6 triliun.

Pemerintah menyiapkan 7 RKP prioritas untuk tahun 2023. Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dengan alokasi anggaran 28,7 triliun kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39,2 triliun. Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain dengan bantuan social, serta pemerataan Pendidikan berkualitas, akses dan mutu Kesehatan sekaligus Pendidikan ketrampilan dan vokasi dengan total alokasi Rp. 223,8 triliun.

Keempat, adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp. 5,6 triliun.prioritas kelima adalah memperkuat infrastruktur untuk pengembangan ekonomi

dan pelayanan dasar, yang meliputi infrastruktur dasar konektivitas dan sumber daya air dengan anggaran Rp. 97 triliun. keenam, yakni membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan alokasi Rp.11 triliun, dan ketujuh adalah stabilitas politik, hukum dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan public seperti pemilihan umum (Pemilu) yang memiliki anggaran Rp. 19,5 triliun dari total alokasi untuk agenda ini sebesar Rp.62 triliun.

Selain itu Sebagai implementasi dari prinsip *Money Follow Program*, alokasi pagu indikatif pada kementerian/lembaga (K/L) diutamakan untuk peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai tema RKP 2023. Berkaitan dengan pemulihan ekonomi ke depan, langkah konkret dalam penyusunan RKP 2023 dimulai dari *Major Projects* yang terkait langsung dengan peningkatan produktivitas. .

RKP tahun 2023 turut menetapkan target dan sasaran indicator pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen, tingkat kemiskinan 7,5-8,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6,0 persen, rasio gini 0,375-0,378, indeks pembangunan manusia 73,31-73,49 persen, penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen, serta nilai tukar petani 103-105, dan nilai tukar nelayan 106-107.

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 2023, konsumsi masyarakat akan didorong tumbuh 5,2-5,4 persen, seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan sejalan dengan peralihan dari masa pandemi ke endemi. investasi juga didorong untuk tumbuh tinggi pada 2023, seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas, pelaksanaan industrialisasi, dan peningkatan investasi pada industry ramah lingkungan. ekspor didorong tumbuh 6,0-7,3 persen. Pertumbuhan ini akan berasal dari peningkatan permintaan global seiring dengan membaiknya kondisi global dan peningkatan produktivitas dalam negeri.

Lima point penting dalam penyusunan RKP tahun 2023 yaitu (1) sasaran dan prioritas pembangunan RKP 2023 menjadi acuan dan referensi dalam penyusunan RKA K/L dan RKPD, (2) pentingnya sinergi perencanaan pembangunan antara RENJA K/L serta RKPD

dengan RKP 2023, (3) perencanaan dan anggaran dan disusun K/L dan pemerintah daerah harus terukur, imperatif dan sesuai amanat presiden “making delivered” diperkuat melalui mekanisme clearing house dengan menerapkan prinsip tematik, holistic integrative dan spasial (THIS). (4) memperkuat integrasi dan sinergi sumber pendanaan yang mengedepankan paradigma bahwa pemanfaatan pendanaan harus dilakukan dengan urutan prioritas, (5) K/L dan Pemerintah Daerah perlu memastikan kesiapan pelaksanaan major project dan didukung system pemantauan, evaluasi dan pengendalian yang andal.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 pasal 4 ayat 1 dalam hal RKP sebagai mana dimaksud pada ayat 2 (ayat 3) belum ditetapkan penyusunan RKPD Tahun 2023 mengacu pada rancangan akhir RKP yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2023.

RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Berkaitan dengan itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2023, mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Tahun 2023 masing-masing provinsi yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2023, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2023 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2023 dan RKPD provinsi Tahun 2023.

### **3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.**

Krisis Covid-19 memerlukan *Unprecedented Policies* atau kebijakan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana kebijakan pemutusan sebaran virus dikombinasikan dengan kebijakan ekonomi. Dalam *outlook* target pembangunan yang sudah disusun oleh Bappenas. Pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023 akan ditargetkan sebesar 5,3% sampai 5,9%, untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan :

1. Dorongan Konsumsi masyarakat yang diperkirakan tumbuh 5,2 hingga 5,4 persen mengingat akan terjadi peningkatan aktivitas warga sejalan peralihan dari masa pandemic ke endemic.
2. Investasi juga diharapkan tumbuh tinggi pada tahun 2023, seiring berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur prioritas, industrialisasi, serta investasi industri ramah lingkungan.
3. Kinerja ekspor akan didorong naik 6% hingga 7,3%, pertumbuhan ini berasal dari permintaan dunia seiring membaiknya kondisi global dan peningkatan produktivitas, dari sisi lapangan usaha sector industry pengolahan diperkirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan, disukung keberlanjutan pengembangan 7 sektor prioritas juga program industry hijau serta perluasan penerapan indstri.
4. Transformasi digital, strategi ini memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk kegiatan ekonomi produktif yang dapat menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja dengan layak. transformasi digital diharapkan tidak menempatkan Indonesia hanya sebagai pasar dari produk produksi digital,

tetapi bisa juga mendorong terciptanya peluang baru bagi industry domestic untuk memasok kebutuhan pasar digital.

Seiring dengan proyeksi perekonomian nasional dan global tahun 2023 dalam menghadapi krisis Pandemi Covid 19, tentu hal tersebut akan berdampak pada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga hal ini membutuhkan perhatian serius, dengan harapan agar pertumbuhan ekonomi mengalami trend positif. kondisi perekonomian daerah Bolaang Mongondow pada tahun 2023 diprediksi mengalami pertumbuhan seiring dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional.

Atas dasar itulah APBD Bolaang Mongondow tahun 2023 menjadikan beberapa indikator ekonomi makro sebagai asumsi dalam penyusunannya, yang antara lain mencakup indikator-indikator makro perekonomian daerah.

- 1) Pertumbuhan ekonomi Bolaang Mongondow diperkirakan akan meningkat didukung oleh paket kebijakan ekonomi pemerintah melalui proyek pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor pertanian, perikanan, perdagangan, konstruksi dan industri.
- 2) Pengendalian inflasi
- 3) Optimalisasi pengembangan sektor pariwisata juga akan sangat mempengaruhi meningkatnya perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow.
- 4) Peningkatan program/kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan kesempatan kerja sehingga menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

### **3.2.1. Pertumbuhan PDRB dan Asumsi Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan PDRB. Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Indikator-indikator lain yang tak kalah penting antara

lain inflasi, kemiskinan, investasi, nilai tukar, dan lain-lain. Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor baik kondisi ekonomi global maupun nasional serta berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah, pada tahun 2023 target yang harus dicapai antara lain: 1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,9 persen dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 persen 2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 7 – 8 persen; IPM menjadi 72,78-72,90; gini rasio pada kisaran 0,375 – 0,378; tingkat pengangguran terbuka 5,3-6 persen; 3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9-5,1 persen, Jawa-Bali 4,8-5,5 persen, Kalimantan 3,6-5,7 persen, Sulawesi 5,4- 7,0 persen, Nusa Tenggara 3,5-5,2 persen, Maluku 5,2-6,2 persen dan Papua 2,6-5,8 persen. **Sementara target pertumbuhan ekonomi Bolaang Mongondow tahun 2023 diproyeksi berada pada kisaran 4,90 persen walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,98 persen dan pada tahun 2021 mulai menunjukkan perbaikan yakni 3,87 persen.** Kondisi perekonomian global yang lebih kuat diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi nasional sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow. Masih berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur pemerintah diharapkan dapat menjaga pertumbuhan investasi yang sedang dalam trend yang positif. Semakin kondusifnya perekonomian juga diharapkan dapat memulihkan optimisme sektor swasta dan turut berkontribusi positif untuk mendorong investasi.

**Tabel. 3.1 Asumsi Pertumbuhan Ekonomi 2017-2021 Kabupaten Bolaang Mongondow**

<b>Indikator</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>6,67%</b>	<b>7,50%</b>	<b>7,84%</b>	<b>0,98%</b>	<b>3,87%</b>	<b>4,90%</b>

**Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2022**

### **3.2.2. Struktur Ekonomi**

Struktur ekonomi di suatu wilayah menunjukkan besaran-besaran masing-masing kategori lapangan usaha di wilayah tersebut. Struktur ekonomi ini akan memperlihatkan lapangan usaha yang menjadi penggerak ekonomi di wilayah tersebut. Lapangan usaha dengan kontribusi yang besar tentu akan sanggup menggerakkan keadaan ekonomi secara keseluruhan di wilayah tersebut. Lapangan usaha ini juga akan menjadi “idola” perekonomian wilayah tersebut. Pemusatan pengembangan lapangan usaha tersebut tentu akan dengan mudah meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun pengambil keputusan tentu tidak boleh terlena dengan hal ini, karena semakin berjalannya waktu serta semakin maju pola perekonomian, beberapa lapangan usaha yang menjadi primadona suatu wilayah suatu saat akan semakin tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha yang potensial perlu didorong sehingga nantinya suatu wilayah tidak akan sepenuhnya bergantung hanya pada satu atau dua lapangan usaha, tetapi akan banyak lapangan usaha-lapangan usaha yang dari potensial yang bias menjadi lapangan usaha utama yang nantinya akan menjadi pendorong baru perekonomian di wilayah tersebut.

Di Bolaang Mongondow sendiri kecenderungan seperti ini mulai terlihat. Pada tahun 2021, lapangan usaha yang mendominasi Bolaang Mongondow adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 42,2 persen. Lapangan usaha lain yang juga mendominasi saat itu adalah Lapangan usaha Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi masing-masing 11,16 persen, 10,46 persen, dan 9,91 persen. Pada Tahun 2019 sebagian besar Kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB menunjukkan tren menurun meskipun tidak signifikan. Terdapat beberapa lapangan usaha yang meningkat yaitu sector Pertambangan dan Penggalian dan Industri Pengolahan. Peningkatan ini didukung dengan adanya perusahaan tambang yang berada di wilayah Bolaang Mongondow. Selain itu Sektor Industri Pengolahan meningkat lebih dari 100%, hal ini terjadi karena

peningkatan pada sub sector Industri Galian Bukan Logam karena pada tahun 2021 Pabrik Semen yang ada di Bolmong tetap beroperasi secara penuh.